

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minyak sawit merupakan salah satu komoditas yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi di dunia, selain karena mudah diproduksi dan sangat stabil, minyak sawit dapat digunakan pada berbagai produk makanan, kosmetik, produk kebersihan dan juga bisa digunakan sebagai sumber biofuel dan biodiesel.¹ Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar dunia, hal ini terlihat dari data produksi kelapa sawit Indonesia pada tahun 2016 mencapai 36.000.000 ton metrik.

Besarnya industri kelapa sawit menjadikan industri ini sebagai salah satu faktor perekonomian penting bagi Indonesia, salah satunya dalam menyerap tenaga kerja, sebanyak 4,2 juta orang merupakan tenaga kerja langsung di sektor kelapa sawit, sementara sekitar 12 juta orang bekerja di sektor-sektor turunan industri kelapa sawit.² Sektor kelapa sawit memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal tersebut terekam dalam total nilai ekspor produk kelapa sawit pada tahun 2017 sebesar Rp 239 triliun, yang merupakan terbesar dan lebih besar dari sektor minyak dan gas.³ Dengan memanfaatkan biodiesel, pemerintah dapat mengurangi impor solar yang membebani keuangan negara.

¹ Minyak Kelapa Sawit.” Indonesia-Investment. Last modified June 26, 2017. Accessed February 18, 2024. <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166#>.

² Windratmo Suwarno, “Kebijakan Sawit Uni Eropa Dan Tantangan Bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2019).

³ Tempo. Bersama, 2018, “Kontribusi Sektor Sawit Bagi Perekonomian Nasional” <https://nasional.tempo.co/read/1119732/kontribusi-sektor-sawit-bagi-perekonomian-nasional/full&view=ok> ⁵ Kumparan, 2018, “Peran Industri Kelapa Sawit bagi Perekonomian Indonesia”, diambil dari <https://kumparan.com/benny-kurnia-rahman/melirik-beberapa-peran-industri-kelapa-sawit-bagiperekonomianindonesia>

Pada tahun 2016, pemerintah berhasil menghemat pengeluaran US\$ 1,1 miliar (Rp 14 triliun) yang setara dengan impor 3 juta kiloliter solar.⁴ Dalam hal pertanian, industri sawit menyumbangkan sekitar 1,5 – 2,5 persen terhadap total produk domestik bruto (PDB).⁵ Dari data yang dijabarkan, dapat dilihat bahwa kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Indonesia juga mendominasi produksi Kelapa sawit secara global, Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pada tahun 2019 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,68 juta hektar dan bila mengacu pada data hasil rekonsiliasi luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar. Industri kelapa sawit dikatakan cerah karena pada tahun 2019 produksi minyak kelapa sawit mencapai 51,8 juta ton atau lebih tinggi 9% dari tahun sebelumnya, yang mana volume ekspor di tahun 2019 juga mencapai 35,8 juta ton angka ini terus menaik dari tahun 2018 sebanyak 4%.⁶

Salah satu destinasi ekspor utama minyak kelapa sawit dari Indonesia pada tahun 2019 adalah Uni Eropa, Uni Eropa merupakan negara pengimpor ketiga setelah India dan Cina. Negara anggota Uni Eropa yang mengimpor sawit dari Indonesia adalah Belanda, Jerman, Italia, serta Spanyol dan karena itu Uni Eropa menjadi salah satu tujuan ekspor minyak sawit Indonesia.⁷

Uni Eropa mengeluarkan resolusi terkait dengan energi terbarukan tersebut yang dikenal dengan *European Union Renewable Energy Directive* yang selanjutnya disebut EU RED yang pertama

⁴ Kumparan, 2018, “Peran Industri Kelapa Sawit bagi Perekonomian Indonesia”, diambil dari <https://kumparan.com/benny-kurnia-rahman/melirik-beberapa-peran-industri-kelapa-sawit-bagiperekonomianindonesia>

⁵ “Minyak Kelapa Sawit.” Indonesia-Investment. Last modified June 26, 2017. Accessed February 18, 2024. <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166#>.

⁶ Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, ‘Refleksi Industri Kelapa Sawit 2019 dan Prospek 2020’, Siaran Pers GAPKI, <https://gapki.id/news/16190/refleksi-industri-kelapa-sawit-2019-dan-prospek-2020>

⁷ Tim Riset dan Publikasi, “Kelapa Sawit sebagai Penopang Perekonomian Nasional”, <https://katadata.co.id/berita/2019/10/07/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional>, diakses pada 7 Oktober 2019

kali diterbitkan tahun 2009, pemberlakuan resolusi ini oleh Uni Eropa menjadi salah satu langkah dalam rangka mengurangi emisi karbon secara global sebagai bentuk komitmen terhadap Protokol Kyoto.⁸ RED didefinisikan sebagai energi yang berasal dari sumber non-fosil yang terbarukan, yaitu angin, surya, energi panas bumi, energi lingkungan, pasang surut, gelombang dan energi laut lainnya, tenaga air, biomassa, gas dari tempat pembuangan sampah, gas dari instalasi pengolahan limbah, dan biogas."

Adanya RED II di Uni Eropa diharapkan dapat memastikan bahwa setidaknya terdapat 10% dari bahan bakar transportasi ramah lingkungan yang mereka ciptakan terbuat dari sumber terbarukan, hal tersebut juga dilakukan oleh Uni Eropa untuk memastikan bahwa transportasi tersebut diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi emisi global, tindakan Uni Eropa dalam membentuk RED II dianggap sebagai bentuk hambatan baru yang diciptakan oleh Uni Eropa dalam rangka memproteksi produk biofuel dari negara, karena selama ini negara Uni Eropa merupakan penghasil utama biodiesel. Uni Eropa dinilai selalu berada di garis terdepan dalam menciptakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Pada *Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II)* dinyatakan bahwa terdapat rencana penghentian pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati di Uni Eropa pada tahun 2030 dan pengurangan penggunaan minyak sawit tersebut akan dimulai pada tahun 2024.⁹

Promosi perdagangan Indonesia di bidang produk sawit merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan ekspor komoditas minyak kelapa sawit dan

⁸ Rosita Dewi, "Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan", *Interpendece Jurnal*, Vol.1 No.2, Mei-Agustus 2013, 150

⁹ Sekar Wiji Rahayu and Fajar Sugianto, "Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 224–236.

produk turunannya ke pasar internasional. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas unggulan Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun perolehan devisa.

Beberapa langkah dan inisiatif yang diambil oleh pemerintah dan pelaku industri untuk mempromosikan produk sawit Indonesia di pasar global antara lain:

1. Pameran dan Forum Dagang Internasional

Indonesia rutin mengikuti pameran dagang internasional yang berfokus pada sektor pertanian dan minyak nabati, seperti *Trade Expo Indonesia* (TEI) dan pameran khusus minyak kelapa sawit di berbagai negara. Forum dagang internasional seperti *Indonesia Palm Oil Conference* (IPOC) juga menjadi platform penting bagi pelaku industri sawit untuk memperkenalkan produknya, menjalin kemitraan, dan memperluas jaringan pasar.

2. Promosi Kelapa Sawit Berkelanjutan

Untuk mengatasi persepsi negatif terhadap kelapa sawit terkait isu lingkungan, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mendorong pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan, ini membantu dalam menumbuhkan kepercayaan di pasar internasional bahwa produk sawit Indonesia memenuhi standar lingkungan dan sosial.

3. Diplomasi Ekonomi

Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik dan atase perdagangan di luar negeri melakukan diplomasi ekonomi untuk membuka akses pasar baru dan mengatasi hambatan dagang, seperti tarif tinggi atau kampanye anti-sawit di beberapa negara. Lobi-lobi perdagangan untuk melawan diskriminasi sawit di Eropa juga terus dilakukan, termasuk dalam forum WTO dan negosiasi bilateral.

4. Diversifikasi Produk Sawit

Selain minyak kelapa sawit mentah (CPO), Indonesia mempromosikan produk turunan kelapa sawit seperti biodiesel, oleokimia, serta produk makanan dan kosmetik berbasis sawit. Diversifikasi ini memberikan nilai tambah yang lebih besar dan membantu membuka segmen pasar yang lebih luas.

5. Kemitraan dengan Negara Importir

Indonesia secara aktif mencari dan memperkuat kemitraan dengan negara-negara importir utama, seperti India, China, dan negara-negara Afrika, yang menjadi pasar terbesar sawit Indonesia. Misi dagang dan kunjungan kerja pejabat Indonesia ke negara-negara ini sering dilakukan untuk memfasilitasi kesepakatan perdagangan baru.

6. Peningkatan Kualitas dan Standardisasi Produk

Pemerintah mendorong peningkatan kualitas produk sawit Indonesia agar sesuai dengan standar internasional. Ini meliputi proses sertifikasi, penelitian, dan inovasi untuk memastikan bahwa produk sawit dapat bersaing di pasar global.

Promosi perdagangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk kelapa sawit Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional meskipun menghadapi tantangan seperti persaingan dengan negara lain, tekanan terkait isu lingkungan, dan perubahan kebijakan perdagangan di negara-negara tujuan ekspor.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai negara produsen sekaligus konsumen kelapa sawit terbesar dunia, industri kelapa sawit telah menjadi bagian penting bagi perekonomian Indonesia. Terjadinya larangan ekspor produk kelapa sawit ke Uni Eropa menjadi sebuah bencana karena Uni Eropa merupakan salah satu tujuan

ekspor utama produk kelapa sawit Indonesia. Kebijakan RED II mengakibatkan Indonesia kehilangan pangsa pasar potensial dalam penjualan produk kelapa sawitnya, memberikan dampak negatif bagi sektor ini, terutama industri dan tenaga kerja serta tentunya mempengaruhi perdagangan internasional khususnya Indonesia dalam ekspor produk kelapa sawit. Ekspansi ekspor minyak sawit perlu dilakukan agar bisa mempromosikan minyak sawit Indonesia ke negara lain. Sangat menarik bagi peneliti untuk meneliti respon Indonesia terhadap kebijakan RED II yang diberlakukan oleh Uni Eropa yang sangat berdampak pada perekonomian Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini, pertanyaan penelitian yang diambil oleh penulis yaitu “Bagaimana respon Indonesia terhadap kebijakan RED II yang diterapkan oleh Uni Eropa?”

1.4 Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon Indonesia terhadap kebijakan RED II yang melarang ekspor sawit ke Uni Eropa.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis dari penelitian ini adalah penulis dilatih untuk memiliki kemampuan analitis, berpikir kritis, serta keterampilan dalam memecahkan masalah juga membantu penulis mengembangkan metodologi ilmiah dan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian yang komprehensif untuk mengetahui bagaimana respon Indonesia dalam merespon *Renewable*

Energy Directive II (RED II) yang diterapkan oleh Uni Eropa yang merugikan Indonesia khususnya dalam bidang Ekpor produk kelapa sawit.

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah menggabarkan bagaimana Indonesia merespon sebuah isu ekonomi yaitu larangan ekspor minyak kelapa sawit yang merugikan perekonomian negara dan masyarakat petani sawit dan diharapkan dapat menjelaskan respon yang akan diambil oleh pemerintah dan memberi pemahaman yang kongkrit mengenai isu tersebut. Sehingga secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi atau setidaknya menjadi salah satu referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan larangan ekspor sawit oleh Uni Eropa.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi seperti penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan pendukung dalam melihat dan memahami permasalahan. Beberapa referensi tersebut diantara lain:

Referensi pertama yang penulis gunakan adalah dari Amanda Fadhilla Chairunisa dan Imam Haryanto yang berjudul Analisis Kebijakan *Renewable Energy Directive II* terhadap perdagangan kelapa sawit Indonesia dikaitkan dengan GATT (2020).¹⁰ Hubungan Ekspor-Impor antara Indonesia dengan Uni Eropa sangatlah menguntungkan antara satu sama lain, namun dengan diberlakukannya kebijakan Renewable Energy Directive II ini hubungan tersebut dapat berakhir.

Tudingan Uni Eropa yang mengatakan produk kelapa sawit yang dihasilkan oleh Indonesia tidak ramah lingkungan dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh lembaga kajian For Free

¹⁰ Chairunisa and Haryanto, "Analisis Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia Dikaitkan Dengan GATT(2020)

Choice Institute yang berkemah di Italia berpendapat bahwa berdasarkan pengujian yang telah mereka lakukan untuk melihat minyak nabati mana yang paling ramah lingkungan dan hasil membuktikan bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling berkelanjutan dan ramah lingkungan dibandingkan biji rapa dan bunga matahari selain itu juga berdasarkan pengujian ini minyak kelapa sawit dinilai memiliki siklus hidup yang baik dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, seperti canola dan bunga matahari.

Referensi ini berfokus pada pandangan dari Uni Eropa yang menuding bahwa produk kelapa sawit yang dihasilkan oleh Indonesia berdampak negative dan alasan Uni Eropa menerapkan kebijakan RED II. Perbedaan referensi dan penelitian yang dilakukan penulis berada pada fokus pembahasan, penulis berfokus pada strategi yang digunakan oleh Indonesia yang merupakan korban dari kebijakan RED II untuk menghadapi resiko kerugian ekonomi yang sangat besar di bidang ekspor sawit.

Referensi yang kedua adalah tulisan dari Alvianita Dewi Hasna, Dela Rinanda Putri, Debby Kemira Putri Drajat yang berjudul *EU Parliament Policy Regarding The Banning of Indonesia's Palm Oil Exports*.¹¹ Referensi ini menjelaskan dampak yang disebabkan oleh kebijakan RED II terhadap Ekonomi Indonesia. Pada Desember 2019, Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO atas diskriminasi terhadap minyak sawit, akibat kebijakan RED II, biodiesel yang terbuat dari minyak sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan Uni Eropa Uni Eropa menerapkan kebijakan biofuel sebagai bentuk komitmen mereka untuk memerangi iklim perubahan, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Paris 2015. Dengan Kebijakan RED II ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia karena ekspor minyak sawit merupakan salah satu andalan Negara Indonesia yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

¹¹ Hasna, Putri, and Drajat, "EU parliament Policy Regarding the Banning of Indonesia'S PalmOil Export(2021)."

Referensi ini memberikan sudut pandang bahwa Uni Eropa sebagai negara yang sangat unggul dalam energi terbarukan menerapkan RED II sebagai sarana pengganti produk sawit yaitu biodiesel yang dianggap mencemari lingkungan. Perbedaan referensi ini dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan yang dibahas, dimana referensi ini berfokus pada dampak yang dihasilkan oleh RED II pada ekonomi Indonesia.

Referensi yang ketiga adalah tulisan dari Chelsea Petrenko, Julia Paltseva, and Stephanie Searle yang berjudul *Ecological Impacts of Palm Oil Expansion in Indonesia*.¹² Referensi ini menjelaskan dampak perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan yang memiliki ancaman serius bagi keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan sumber daya alam. Mayoritas penduduk asli Indonesia menderita karena industri kelapa sawit alih-alih mendapat manfaat darinya. Kerugian bagi manusia datang dalam bentuk dampak kesehatan yang serius dari kebakaran dan polusi, selain hilangnya hak atas tanah dan menipisnya sumber daya alam yang diandalkan masyarakat adat untuk kelangsungan hidup.

Referensi ini memberikan pandangan bahwa perkebunan kelapa sawit memberikan dampak yang buruk pada lingkungan dimana menjadi landasan terbentuknya RED II. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada topik yang dibahas, yaitu dimana studi kasus ini berfokus pada konsekuensi serius yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit seperti keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan sumber daya alam, dengan bukti menunjukkan hilangnya karbon yang menghancurkan dari lanskap, ancaman terhadap spesies langka dan endemik, dan polusi udara dan air.

¹² Petrenko, Paltseva, and Searle, "Ecological Impacts of Palm Oil Expansion in Indonesia | International Council on Clean Transportation."

Referensi yang keempat adalah tulisan dari Syahrul Salam and Mansur Juned yang berjudul *Ban of Indonesia's Palm Oil Products to the European Union and Indonesia's Diplomacy Efforts*.¹³

Referensi ini menjelaskan bahwa Uni Eropa telah secara resmi melarang produk minyak sawit sebagai bahan biofuel untuk anggotanya secara bertahap untuk masalah kerusakan lingkungan. Kebijakan ini mengancam komoditas sawit dan pada gilirannya memberikan efek negatif terhadap keamanan ekonomi Indonesia.

Referensi ini memberikan sudut pandang tentang kebijakan RED II yang telah dikeluarkan Uni Eropa adalah perang dagang dan tidak hanya dianggap sebagai masalah konservasi lingkungan tetapi juga mengandung kepentingan untuk melindungi produk biofuel Uni Eropa karena popularitasnya jauh di bawah produk minyak sawit Indonesia. Sebagai kawasan negara-negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi, Uni Eropa mencoba menekan negara-negara berkembang seperti Indonesia melalui narasi isu-isu lingkungan sebagaimana digariskan dalam kampanye gelap dan kebijakan luar negeri. Hal ini memicu perlawanan dari Indonesia dan membawa masalah perdagangan sebagai sengketa ke Organisasi Perdagangan Dunia.

Perbedaan yang diambil dan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada topik yang dibahas, dimana studi kasus ini topik permasalahannya adalah pelarangan ekspor sawit yang menyebabkan timbulnya permasalahan pada ekonomi Indonesia dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menghadapi krisis ekonomi di bidang ekspor sawit.

Referensi terakhir adalah tulisan dari Khoirul Anam, Akhmad Fauzi, Indra Tjahaja Amir, Hamidah Hendrarini yang berjudul *Impact Of EU's RED Policy On The Performance Of Indonesian Palm Oil Company*.¹⁴ Referensi ini menjelaskan bahwa Uni Eropa (UE) adalah tujuan

¹³ Mansur Juned, "Ban of Indonesia's Palm Oil Products to the European Union and Indonesia's," no. July (2022).

¹⁴ Impact Of EU's RED Policy On The Performance Of Indonesian Palm Oil Company

ekspor potensial untuk produk minyak kelapa sawit Indonesia. UE mengeluarkan kebijakan Renewable Energy Directives (RED) untuk mengatur pengembangan energi terbarukan di wilayahnya. Kebijakan RED melarang penggunaan produk minyak nabati yang tidak berkelanjutan dalam industri biofuel, menciptakan hambatan non-tarif bagi ekspor minyak kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan RED terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji pengaruh ekspor, kondisi makroekonomi, manajemen risiko, dan pengelolaan keberlanjutan lingkungan terhadap kinerja perusahaan.

Perbedaan yang diambil dari referensi diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada perbedaan kebijakan yang dibahas. Alasan penulis mengambil referensi yang berbeda kebijakannya adalah untuk mengetahui dasar dari terbentuknya *Renewable Energy Directive II*.

1.7 Kerangka Pemikiran

1.7.1 Diplomasi Ekonomi

Menurut Kishan S. Rana diplomasi ekonomi adalah sebuah proses yang dilakukan negara dalam mengelola hubungan luar negeri dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan nasional di segala bidang, termasuk dibidang perdagangan, investasi dan kegiatan lainnya dari interaksi ekonomi. Dimensi diplomasi ekonomi tersebut berupa bilateral, multilateral atau regional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, layanan diplomatik dan komersial serta aktor non-negara lainnya yang membuat kemitraan ekonomi bersifat dinamis.¹⁵

Terdapat empat pilar diplomasi ekonomi diantaranya sebagai berikut:

¹⁵ Kishan S. Rana, *Economic Diplomacy : the Experience of Developing States*, Chapter Eleven, 2

1. *Trade promotion.*
2. *Investment promotion.*
3. *Harvesting technology.*
4. *Managing economic aid.*¹⁶

Promosi negara adalah fondasi utama yang mendukung semua hal diatas dan tergabung dalam membentuk citra, branding, serta promosi pariwisata. Saat ini, citra negara asal mendasari sebagian besar kegiatan diplomatik. Perwakilan resmi negara

seperti Kementerian Luar Negeri, Kedutaan dan Diplomat memiliki tanggung jawab untuk membangun citra baik negara dalam melakukan hubungan eksternal.¹⁷

Dalam diplomasi ekonomi Indonesia, peran negara sebagai aktor diplomasi ekonomi terdapat perbedaan fungsi dengan instansi di negara lain. Peran Kemenlu RI masih sangat terbatas menurut aktivitas diplomasi ekonomi yang dikemukakan Kishan S. Rana, baik itu aktivitas internal maupun eksternal. Hal ini terlihat dengan tidak termasuknya Kemenlu RI sebagai mitra kerja oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan beberapa aktivitas eksternal ekonomi utama dijalankan oleh Kementerian Perdagangan dalam aktivitas perdagangan internasional.¹⁸

Kondisi instansi pemerintah Indonesia tersebut membuat diplomasi ekonomi Indonesia masih sangat terbatas pada tatanan praktis. Pada tahun 2011 Indonesia hanya memberikan satu indikator keberhasilan diplomasi ekonomi dengan peningkatan volume ekspor dengan negara mitra. Dalam tipologi Kishan S. Rana setidaknya terdapat empat indikator yang dapat diturun untuk mengukur keberhasilan diplomasi ekonomi suatu negara. Dengan satu indikator tersebut Indonesia hanya dapat menjelaskan indikator keberhasilan *Trade promotion* yang dilakukan oleh Kementerian

¹⁶ Kishan S. Rana, *Diplomacy Economic Concepts* (New Deli : Manas, 2006), 1.

¹⁷ Kishan S. Rana, 2

¹⁸ P. M. Erza Killian, "Paragdim dan Probematika Diplomasi Ekonomi," *Global & Strategis* Vol. 6 No. 2 (Juli-Desember 2012): 175.

Perdagangan, karena peniadaan atau sangat terbatasnya peran Kemenlu RI dalam aktivitas *investment promotion, harvesting technology dan managing economic aid*.¹⁹

Untuk menganalisis respon Indonesia dalam menanggapi kebijakan RED II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, maka dari empat pilar diplomasi ekonomi menurut Kishan S. Rana diatas yang terdiri dari *Trade promotion, investment promotion, harvesting technology dan managing economic aid*, peneliti hanya hanya berfokus pada agenda *Trade promotion*.

Pemilihan *Trade promotion* daripada opsi lainnya seperti *investment promotion, harvestment technology, dan managing economic aid* disebabkan oleh beberapa alasan untuk kebutuhan ekonomi dan tujuan jangka panjang, yaitu :

1. Meningkatkan Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi

Trade promotion bertujuan untuk mendorong produk lokal memasuki pasar internasional, yang dapat memperbesar ekspor. Dengan meningkatnya ekspor, negara mendapatkan tambahan devisa, yang pada akhirnya memperkuat nilai tukar mata uang, mengurangi defisit perdagangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2. Diversifikasi Pasar

Dengan mengedepankan *Trade promotion*, negara atau perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar ke berbagai negara, sehingga tidak bergantung pada satu pasar saja. Diversifikasi ini menurunkan risiko jika terjadi masalah di satu negara atau wilayah tertentu, dan meningkatkan stabilitas ekonomi.

3. Penciptaan Lapangan Kerja

¹⁹ 25 P. M. Erza Killian: 172.

Peningkatan ekspor melalui *Trade promotion* dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri, yang kemudian akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Ini berdampak positif pada tingkat pengangguran dan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.

4. Dampak Langsung terhadap Sektor Industri Lokal

Dengan fokus pada promosi perdagangan, industri lokal diberdayakan untuk memenuhi standar internasional. *Trade promotion* mendorong peningkatan kualitas produk dalam negeri melalui standar yang lebih tinggi dan inovasi, sehingga lebih kompetitif di pasar global.

5. Peningkatan Hubungan Ekonomi dengan Negara Lain

Trade promotion memperkuat hubungan ekonomi dengan negara mitra dagang. Kerjasama dagang yang baik membuka peluang bagi kerjasama lain, termasuk investasi, teknologi, dan bantuan ekonomi di masa depan, menjadikannya sebagai strategi yang dapat membuka pintu bagi peluang lainnya.

Terdapat beberapa bentuk *Trade promotion* dalam mengatasi permasalahan maupun menjadi strategi peningkatan ekspor, diantaranya sebagai berikut.²⁰

1. Analisis target pasar adalah bentuk dan strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh aktor negara dengan cara melakukan pengamatan dan penelitian terhadap target pasar. Analisis target pasar bertujuan untuk melihat komoditas potensial dalam target pasar dan memberikan bantuan informasi terhadap eksportir dalam negeri, dengan melihat indikator persaingan di negara tujuan, hambatan-hambatan yang akan di hadapi eksportir, dan permintaan mengenai produk ekspor.

²⁰ 27 Kishan S. Rana, *Diplomacy Economic Concepts* (New Deli : Manas, 2006), 6-8

2. Membantu perusahaan lokal dalam mengadakan ekspor adalah bentuk dan strategi diplomasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan volume ekspor dengan lebih banyak melibatkan perusahaan lokal.
3. Market data, dalam sebuah promosi yang berhadapan langsung dengan pasar atau peluang lain, aktor negara penting untuk menyediakan data pasar dan prediksi bagi asosiasi ekspor domestik dan pengeksportir berupa kontak importir, kunjungan perdagangan dan dialog dengan pelaku besar yang menghasilkan studi pasar.
4. Prioritas khusus untuk produk baru, seringkali eksportir tidak menyadari terdapat peluang baru yang dapat dihasilkan. Aktor negara perlu menyediakan informasi dan saran, serta memberikan kontribusi unik dalam keterlibatan eksportir melakukan promosi produk baru untuk menciptakan pasar baru yang permanen.
5. Penyelesaian sengketa dagang adalah bentuk dan strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan aktor negara dengan melakukan mediasi dan mendesak penyelesaian sengketa dagang, serta pertimbangan yang tidak merugikan eksportir lokal.
6. Buyer-seller meets merupakan strategi dan bentuk diplomasi ekonomi dengan melakukan pertemuan besar yang mencakup perusahaan lokal dalam jumlah besar atau pertemuan kecil antara pembeli dan penjual untuk mencari peluang pasar. Contoh seperti mengadakan pameran dan business center.
7. Partisipasi pada Pameran Dagang seperti trade fair dan pameran internasional lainnya, merupakan bentuk dan strategi diplomasi ekonomi untuk memperoleh market intelligent mengenai trend terbaru dan peluang tambahan. Mengorganisir partisipasi pada pameran dagang adalah keterampilan khusus yang harus dikuasai perwakilan komersial. Walaupun,

tidak terjadi transaksi jual beli, kunjungan pameran dapat bermanfaat untuk membuat kontak dan mendapatkan wawasan.

Pertimbangan terhadap tiga pilar lainnya yang mendukung Diplomasi Ekonomi, yaitu:

1. Investment Promotion: Fokus pada menarik investasi mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mendatangkan hasil dan tergantung pada iklim investasi dan daya tarik suatu negara.
2. Harvestment Technology: Meskipun penting untuk sektor pertanian, ini lebih terbatas dampaknya terhadap sektor-sektor lain yang tidak berhubungan langsung dengan pertanian.
3. Managing Economic Aid: Mengelola bantuan ekonomi baik untuk jangka pendek, namun tidak sepenuhnya mandiri atau berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, *Trade promotion* dipilih karena dampak ekonominya yang lebih langsung, luas, dan berkelanjutan jika dikelola dengan baik.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memakai metode kualitatif, menurut Creswell metode penelitian kualitatif merupakan metode yang dipakai guna mengetahui makna dari permasalahan kelompok maupun individu dalam sebuah fenomena atau permasalahan sosial.²¹ Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana respon Indonesia terhadap kebijakan RED II yang diterapkan oleh Uni Eropa.

²¹ J. W. Creswell, *Research Design: Quantitative and Mixed Method Approach* (New York: Sage Publications, 2009), 4.

1.8.2 Batas Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membuat batas penelitian yaitu pada tahun 2020- 2024. Peneliti mengambil batas pada tahun 2020-2024 karena penulis ingin mengetahui respon yang digunakan Indonesia dalam menghadapi kebijakan RED II oleh Uni Eropa dari awal terbentuknya kebijakan hingga sekarang. Adanya batasan dalam penelitian ini, akan membantu peneliti agar lebih fokus terhadap isu yang diteliti.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek/unit yang akan dianalisis perilakunya atau sering disebut dengan variable dependen, sedangkan unit eksplanasi adalah unit atau objek yang mempengaruhi unit analisis atau juga bisa disebut dengan variable independen.²²

Dari penjelasan di atas, unit analisis atau variabel dependen dari penelitian ini adalah bagaimana Indonesia merespon kebijakan RED II dan unit ekplanasi atau variable independen dari penelitian ini adalah kebijakan RED II oleh Uni Eropa.

Dalam kajian Hubungan Internasional, tingkat analisis dalam sebuah penelitian adalah tingkat unit analisa dan eksplanasi fenomena tersebut akan diteliti. Secara garis besar, terdapat tiga kelompok tingkat analisa, yaitu yang pertama adalah tingkat rendah atau reduksionis, tingkatan ini menjadikan individu atau kelompok dan melihat perilaku individu atau kelompok, yang kedua adalah tingkat sama atau korelasionis, yaitu dengan melihat kebijakan yang diambil suatu negara-bangsa dalam suatu fenomena dan yang terakhir adalah tingkat lebih tinggi atau induksionis, yaitu dengan melihat pengaruh sistem regional dan global dalam suatu fenomena²³.

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi kedua)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

²³ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional*, 39.

Dari penjelasan diatas, maka tingkat analisis dari penelitian ini adalah negara, dimana penelitian ini menjelaskan bagaimana respon Indonesia terhadap kebijakan RED II.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data yang dapat menunjang data-data terkait. Creswell menjelaskan bahwa studi kepustakaan ialah suatu teknik mengumpulkan data yang berasal dari berbagai sumber yang bersifat publik maupun pribadi seperti berita media massa, jurnal, buku, surat, wawancara personal, maupun jurnal pribadi.²⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber, utamanya mengenai respon Indonesia terhadap kebijakan RED II yang diterapkan Uni Eropa didapatkan dari web instansi pemerintahan terkait, dan sumber lain seperti buku, jurnal, web dan media.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengatur data dan mengklasifikasikannya ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar sehingga topik dapat ditemukan dan hipotesis dapat dirumuskan berdasarkan data. Menurut Patton (1980) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁵

Berdasarkan kepada tulisan Miles dan Huberman terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data, yaitu diawali dengan tahapan reduksi data dengan cara melakukan kategorisasi konsep dan elemen yang disusun secara sistematis. berikutnya yaitu tahapan penyajian data yang mana dalam tahapan

²⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 181

²⁵ Dewi Kurniasih et al., "Teknik Analisa," Alfabeta Bandung (2021): 1–9.

ini dilakukan penggabungan atau penghubungan dari data-data, fakta-fakta, dan konsep yang telah diperoleh, dan tahapan terakhir yaitu kesimpulan dan verifikasi.²⁶

1. Reduksi Data

Pada reduksi data, penulis mengelompokkan data yang telah dikumpulkan kedalam beberapa kategori. Pengelompokan data yang dilakukan berdasarkan pada kategori luas perkebunan sawit di Indonesia, pengeluaran kebijakan RED II oleh Uni Eropa, kerugian Indonesia dalam ekspor sawit yang disebabkan oleh kebijakan RED II. Setelah pengelompokan data tersebut, penulis akan membaca dokumen yang berkaitan dengan tindakan dan strategi yang dilakukan Indonesia untuk menghadapi kebijakan RED II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

2. Penyajian Data

Setelah membaca dokumen yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, penulis akan mengambil data penting dari bahan bacaan tersebut dan melakukan paraphrase serta menganalisis bahan bacaan yang telah dikumpulkan. Untuk memulai penelitian, penulis akan menjelaskan produksi sawit di Indonesia, kemudian penulis akan menampilkan kebijakan yang dibentuk oleh Uni Eropa yang berupa Renewable Energy Directive yang berisi larangan impor produk sawit ke Uni Eropa. Dari hal tersebut, penulis akan membahas mengenai strategi Indonesia untuk menghadapi kebijakan tersebut mengingat bahwa Uni Eropa merupakan salah satu target ekspor produk sawit terbesar bagi Indonesia.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Setelah proses penyajian data yang berupa hasil analisis penulis dan pengaplikasian konsep dalam penelitian, penulis akan menyimpulkan dan melakukan verifikasi terhadap

²⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication. 1994. hal 18

penelitian tersebut guna memastikan bahwa kerangka berfikir yang digunakan mampu menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi signifikansi penelitian dan bagaimana teknik mengelola penelitian tersebut yang dibagi kedalam latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kebijakan Renewable Energy Directive II

Bab ini berisi tentang kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia untuk menghadapi kebijakan RED II oleh Uni Eropa.

Bab III: Dampak kebijakan RED II

Bab ini berisi tentang bagaimana respon Indonesia mengatasi dampak yang terjadi oleh kebijakan RED II yang diterapkan oleh Uni Eropa dimana terjadinya larangan ekspor produk minyak kelapa sawit dan langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia

Bab IV: DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MERESPON KEBIJAKAN RED II OLEH UNI EROPA

Bab ini berisi penjelasan tentang analisa penulis mengenai bagaimana Indonesia merespon kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa yaitu RED II dengan konsep Diplomasi Ekonomi.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi penutup dan saran.